

Pendidikan IPS Berbasis Perencanaan Partisipatif untuk Mengembangkan Kesadaran Kewargaan dan Kepedulian terhadap Lingkungan Perkotaan

[Participatory Planning-Based Social Studies Education to Develop Civic Awareness and Concern for the Urban Environment]

Alfafa Ramadhani^{1*}, Moch Sofwan²

¹ Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro, Indonesia, ² Universitas PGRI Adibuana Surabaya, Indonesia

*Corresponding author: alfafaramadhani@gmail.com

RECEIVED
[13 February 2025]

REVISED
[02 August 2025]

ACCEPTED
[06 December 2025]

INDONESIAN ABSTRACT

Perkembangan kawasan perkotaan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pelayanan masyarakat, tetapi juga memunculkan berbagai persoalan sosial dan lingkungan, seperti kemacetan, banjir, pencemaran, timbunan sampah, berkurangnya ruang terbuka hijau, ketimpangan akses terhadap fasilitas publik, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Permasalahan tersebut perlu diperkenalkan kepada peserta didik melalui pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial yang kontekstual dan berorientasi pada tindakan. Artikel ini bertujuan menganalisis penerapan perencanaan partisipatif sebagai pendekatan pembelajaran IPS untuk mengembangkan kesadaran kewargaan dan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan perkotaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui tinjauan pustaka naratif terstruktur. Literatur dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan Pendidikan IPS, perencanaan partisipatif, pendidikan kewargaan, pendidikan lingkungan, dan pembelajaran berbasis permasalahan perkotaan. Data dianalisis menggunakan sintesis tematik. Hasil kajian menunjukkan bahwa perencanaan partisipatif dapat diadaptasi ke dalam pembelajaran IPS melalui tahapan orientasi masalah, pengumpulan data, pemetaan masalah, analisis pemangku kepentingan, penentuan prioritas, penyusunan alternatif solusi, musyawarah, perumusan rencana tindakan, dan refleksi. Pendekatan tersebut memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memahami hubungan antara ruang, masyarakat, lingkungan, dan kebijakan sekaligus mempraktikkan dialog, kerja sama, pengambilan keputusan, serta tindakan kewargaan. Pendidikan IPS berbasis perencanaan partisipatif berpotensi menjadi model pembelajaran yang kontekstual, demokratis, kolaboratif, dan berorientasi pada penyelesaian permasalahan lingkungan perkotaan.

Keywords: Pendidikan IPS, Perencanaan Partisipatif, Kesadaran Kewargaan, Kepedulian Lingkungan, Lingkungan Perkotaan

ENGLISH ABSTRACT

The development of urban areas not only results in economic growth and improved public services, but also gives rise to various social and environmental problems, such as traffic jams, flooding, pollution, waste generation, reduced green open spaces, unequal access to public facilities, and low community participation in environmental management. These problems need to be addressed to students who are raised through contextual and action-focused Social Studies learning. This article aims to analyze the application of participatory planning as a social studies learning approach to develop students' civic awareness and concern for the urban environment. The study uses a qualitative approach through a structured narrative literature review. The literature was selected based on its relevance to social studies education, participatory planning, civic education, environmental education, and urban problem-based learning. Data analysis used thematic synthesis. The results of the study indicate that participatory planning can be adapted to social studies learning

through the stages of problem organization, data collection, problem mapping analysis, stakeholders, priority determination, preparation of alternative solutions, deliberation, preparation of action plans, and reflection. This approach provides students with the opportunity to understand the relationships between space, society, the environment, and policy, while simultaneously fostering dialogue, collaboration, decision-making, and civic action. Participatory planning-based social studies education has the potential to become a contextual, democratic, collaborative learning model that is oriented toward solving urban environmental problems.

Keywords: Social Studies Education, Participatory Planning, Civic Awareness, Environmental Awareness, Urban Environment

PENDAHULUAN

Urbanisasi dan pertumbuhan kawasan perkotaan telah mengubah pola kehidupan masyarakat secara cepat. Kota berkembang menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, ekonomi, perdagangan, industri, teknologi, dan pelayanan public (Un-Habitat, 2018). Perkembangan tersebut memberikan berbagai kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup (Harahap, 2013). Namun, pertumbuhan kota yang tidak diikuti dengan pengelolaan ruang dan lingkungan yang memadai juga dapat menghasilkan berbagai persoalan. Kemacetan, banjir, pencemaran udara dan air, timbunan sampah, berkurangnya ruang terbuka hijau, permukiman tidak layak, serta ketimpangan akses terhadap fasilitas publik merupakan beberapa persoalan yang banyak dijumpai dalam kehidupan perkotaan.

Persoalan perkotaan pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik dan teknis. Banjir, misalnya, tidak semata-mata disebabkan oleh kapasitas drainase yang terbatas, tetapi juga berhubungan dengan perubahan penggunaan lahan, kebiasaan membuang sampah, lemahnya pengawasan pembangunan, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan (Juwono & Subagiyo, 2017). Demikian pula, kemacetan tidak hanya berkaitan dengan kapasitas jalan, tetapi juga dipengaruhi oleh pilihan moda transportasi, pola penggunaan lahan, aksesibilitas pelayanan, dan kebijakan transportasi. Oleh karena itu, persoalan perkotaan perlu dipahami sebagai persoalan sosial, lingkungan, ekonomi, politik, dan keruangan yang saling berkaitan.

Pemahaman tentang kompleksitas permasalahan kota perlu dibangun sejak peserta didik berada di lingkungan sekolah. Peserta didik merupakan bagian dari masyarakat perkotaan yang menggunakan jalan, taman, sekolah, transportasi, tempat ibadah, pasar, saluran drainase, dan berbagai fasilitas publik lainnya. Mereka juga mengalami secara langsung dampak kemacetan, banjir, pencemaran, suhu perkotaan, kekurangan ruang terbuka, dan persoalan sampah. Meskipun demikian, peserta didik sering kali hanya ditempatkan sebagai penerima kebijakan dan belum banyak dilibatkan dalam proses mengidentifikasi maupun merumuskan solusi terhadap permasalahan di lingkungannya.

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial mempunyai posisi strategis dalam mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memahami kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Pendidikan IPS tidak hanya bertujuan menyampaikan pengetahuan mengenai geografi, ekonomi, sejarah, dan sosiologi, tetapi juga mempersiapkan peserta didik menjadi warga masyarakat yang kritis, bertanggung jawab, dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan demokratis. Kajian Pendidikan IPS kontemporer menempatkan keberlanjutan ekologis, keterlibatan kewargaan, kompetensi kewargaan, kesetaraan, dan perubahan sosial sebagai tantangan penting yang perlu direspons melalui penelitian dan praktik pembelajaran. Namun, pembelajaran IPS di sekolah masih berpotensi terjebak pada penyampaian materi secara tekstual dan berorientasi pada hafalan. Peserta didik mempelajari definisi kota, jenis penggunaan lahan, interaksi sosial, lembaga pemerintahan, dan permasalahan lingkungan secara terpisah tanpa memperoleh kesempatan yang cukup untuk menghubungkannya dengan persoalan nyata. Kondisi tersebut menyebabkan pengetahuan yang diperoleh peserta didik belum selalu berkembang menjadi kesadaran, sikap, dan tindakan sosial.

Isu lingkungan sebenarnya sangat relevan dengan Pendidikan IPS karena permasalahan lingkungan tidak dapat dilepaskan dari perilaku manusia, kebijakan publik, distribusi sumber daya, kepentingan ekonomi, relasi kekuasaan, dan tanggung jawab kewargaan (Siska, 2018). Pendidikan lingkungan dengan demikian bukan hanya menjadi bagian dari pembelajaran ilmu alam. Kajian dalam Pendidikan IPS menegaskan bahwa persoalan lingkungan juga merupakan persoalan sosial dan kewargaan, sehingga perlu dipelajari melalui analisis hubungan antara manusia, masyarakat, kebijakan, ruang, dan keberlanjutan.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menghubungkan pembelajaran IPS dengan persoalan nyata adalah perencanaan partisipatif (Wulandari et al., 2025). Dalam praktik perencanaan wilayah dan kota, perencanaan partisipatif menempatkan masyarakat sebagai pihak yang memiliki pengetahuan, pengalaman, kepentingan, dan hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi berperan dalam mengidentifikasi masalah, menentukan kebutuhan, menyampaikan aspirasi, menilai alternatif, menentukan prioritas, dan merumuskan rencana tindakan. Prinsip tersebut dapat diadaptasi ke dalam pembelajaran IPS. Peserta didik dapat dilibatkan dalam proses pengamatan lingkungan, pengumpulan data, pemetaan masalah, diskusi kelompok, analisis pemangku kepentingan, musyawarah, dan penyusunan usulan penataan lingkungan. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik tidak hanya mempelajari konsep, tetapi juga mempraktikkan proses sosial yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Mereka belajar bahwa penyelesaian persoalan kota membutuhkan data, argumentasi, dialog, kerja sama, penghargaan terhadap perbedaan, dan kesediaan mempertimbangkan kepentingan bersama.

Pembelajaran partisipatif sejalan dengan prinsip Education for Sustainable Development yang menekankan pentingnya pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap agar peserta didik mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab bagi integritas lingkungan, kelayakan ekonomi, dan keadilan sosial (Veoreza et al., 2023). Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan juga menempatkan peserta didik sebagai calon agen perubahan, bukan sekadar penerima pengetahuan mengenai keberlanjutan (Sidiropoulos, 2022). Sejumlah penelitian memperlihatkan bahwa pembelajaran lingkungan yang berorientasi pada komunitas lokal, pengalaman langsung, interaksi sosial, partisipasi, dan tindakan nyata dapat mendukung perkembangan keterlibatan kewargaan. Tinjauan terhadap 56 penelitian pendidikan lingkungan menemukan lima karakteristik penting, yaitu berfokus pada komunitas lokal, melibatkan peserta didik secara aktif, menempatkan tindakan sebagai bagian pembelajaran, mengembangkan kemampuan kognitif jangka panjang, dan menyediakan kesempatan untuk melakukan interaksi sosial yang bermakna.

Berdasarkan uraian tersebut, perencanaan partisipatif berpotensi menjadi pendekatan yang mempertemukan Pendidikan IPS, pendidikan kewargaan, pendidikan lingkungan, dan ilmu perencanaan wilayah dan kota. Meskipun pembelajaran berbasis proyek, masalah, dan lingkungan telah banyak dikembangkan, penerapan tahapan perencanaan partisipatif secara eksplisit dalam Pendidikan IPS masih memerlukan penguatan konseptual. Artikel ini bertujuan menganalisis relevansi dan tahapan penerapan Pendidikan IPS berbasis perencanaan partisipatif untuk mengembangkan kesadaran kewargaan dan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan perkotaan.

LITERATURE REVIEW

Pendidikan IPS sebagai Wahana Pembentukan Warga Negara

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan bidang pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu sosial untuk membantu peserta didik memahami hubungan antara manusia, masyarakat, ruang, lingkungan, ekonomi, budaya, dan pemerintahan (Sedwal., 2024). Orientasi Pendidikan IPS tidak hanya terletak pada penguasaan pengetahuan faktual, tetapi juga pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, pengambilan keputusan, kesadaran sosial, dan partisipasi sebagai warga negara. Dalam masyarakat demokratis, pembelajaran IPS mempunyai tanggung jawab untuk mempertemukan pemahaman konseptual dengan persoalan publik yang benar-benar dialami peserta didik.

Levy et al. (2023) menempatkan keberlanjutan ekologis, keterlibatan kewargaan, kesetaraan dan inklusi, pluralisme politik, kompetensi kewargaan, literasi media, serta perubahan sosial sebagai tantangan penting yang perlu direspons oleh penelitian dan praktik Pendidikan IPS. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran IPS perlu bergerak melampaui hafalan materi menuju pengalaman belajar yang memungkinkan peserta didik menelaah masalah bersama dan terlibat dalam upaya penyelesaiannya. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya dipersiapkan untuk mengetahui struktur kehidupan sosial, tetapi juga untuk berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam masyarakat demokratis.

Dalam konteks lingkungan perkotaan, Pendidikan IPS dapat membantu peserta didik memahami bahwa banjir, kemacetan, timbunan sampah, berkurangnya ruang terbuka hijau, permukiman tidak layak, pencemaran, dan ketimpangan pelayanan publik bukanlah persoalan yang berdiri sendiri. Berbagai persoalan tersebut terbentuk melalui interaksi antara penggunaan ruang, perilaku masyarakat, kegiatan ekonomi, kebijakan

pemerintah, kepentingan kelompok, dan kondisi lingkungan. Pembelajaran IPS dengan demikian dapat menjadi ruang untuk mengembangkan cara berpikir sistemik. Peserta didik tidak hanya dituntut mengenali gejala suatu masalah, tetapi juga memahami penyebab struktural, kelompok yang terdampak, distribusi manfaat dan risiko, serta alternatif kebijakan yang dapat dilakukan.

Pembelajaran mengenai persoalan perkotaan juga memperkuat fungsi IPS sebagai pendidikan yang kontekstual (Rubin, 2012). Lingkungan tempat tinggal peserta didik dapat diposisikan sebagai laboratorium sosial untuk mengamati bagaimana masyarakat menggunakan ruang, memenuhi kebutuhan, membangun hubungan sosial, mengalami konflik kepentingan, dan merespons kebijakan. Melalui pendekatan tersebut, materi geografi, sosiologi, ekonomi, sejarah, dan kewargaan tidak dipelajari secara terpisah, melainkan digunakan secara terpadu untuk memahami satu persoalan nyata.

Perencanaan Partisipatif sebagai Landasan Pedagogis

Perencanaan partisipatif berangkat dari pemikiran bahwa masyarakat yang terkena dampak suatu kebijakan perlu memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam perumusan masalah dan pengambilan keputusan (Prasojo, 2004). Masyarakat tidak hanya menjadi penerima hasil pembangunan, tetapi juga menjadi sumber pengetahuan, pengalaman, aspirasi, dan alternatif pemecahan masalah. Dalam proses tersebut, keputusan tidak sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah atau tenaga ahli, tetapi disusun melalui komunikasi dan pertimbangan bersama dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

Arnstein (1969) menjelaskan partisipasi melalui suatu jenjang yang menunjukkan perbedaan antara keterlibatan semu dan keterlibatan yang memberikan pengaruh nyata terhadap keputusan. Pada tingkat yang rendah, masyarakat hanya diberikan informasi atau dilibatkan secara simbolis tanpa mempunyai kekuatan untuk memengaruhi kebijakan. Pada tingkat yang lebih tinggi, masyarakat mempunyai ruang untuk membangun kemitraan, bernegosiasi, dan menentukan keputusan. Kerangka ini menegaskan bahwa kehadiran seseorang dalam suatu kegiatan belum tentu menunjukkan partisipasi yang bermakna. Konsep tersebut relevan untuk diterapkan dalam pendidikan. Kehadiran peserta didik dalam diskusi kelompok tidak selalu berarti bahwa mereka benar-benar berpartisipasi (Ruslandi et al., 2025). Partisipasi yang bermakna terjadi ketika peserta didik mempunyai kesempatan menyampaikan pengalaman, memilih permasalahan, mengajukan pertanyaan, mengumpulkan bukti, mempertimbangkan alternatif, dan memengaruhi rencana tindakan yang dihasilkan. Peserta didik tidak hanya melaksanakan instruksi guru, tetapi terlibat dalam menentukan arah proses pembelajaran.

Dalam pembelajaran IPS, prinsip perencanaan partisipatif dapat diterjemahkan menjadi proses belajar yang kolaboratif, deliberatif, dan berbasis penyelidikan (Wati, 2025). Guru tidak sepenuhnya menentukan permasalahan dan jawabannya, tetapi merancang kondisi agar peserta didik mampu melakukan pengamatan dan analisis. Peserta didik dapat mengamati lingkungan, mewawancarai warga, mendokumentasikan kondisi lapangan, memetakan lokasi permasalahan, mengidentifikasi pemangku kepentingan, menentukan prioritas, dan menyusun alternatif solusi. Proses tersebut mengubah peserta didik dari penerima informasi menjadi subjek pembelajaran yang memiliki suara, pengetahuan lokal, dan tanggung jawab terhadap keputusan yang dihasilkan.

Perencanaan partisipatif juga mengajarkan bahwa penyelesaian masalah perkotaan tidak cukup hanya didasarkan pada solusi teknis. Setiap alternatif perlu mempertimbangkan kepentingan masyarakat, kemampuan sumber daya, kewenangan lembaga, dampak lingkungan, keadilan sosial, dan keberlanjutan. Oleh sebab itu, pendekatan ini dapat menjadi jembatan antara ilmu perencanaan wilayah dan kota dengan tujuan Pendidikan IPS.

Pembelajaran Berbasis Tempat dan Lingkungan Perkotaan

Pendidikan IPS berbasis perencanaan partisipatif mempunyai hubungan yang kuat dengan pembelajaran berbasis tempat atau *place-based education* (Ardaniati, 2015). Pendekatan ini menempatkan lingkungan fisik, sosial, dan budaya di sekitar peserta didik sebagai sumber utama dalam proses pembelajaran. Tempat tidak hanya dipahami sebagai lokasi geografis, tetapi juga sebagai ruang yang mengandung pengalaman, identitas, hubungan sosial, sejarah, nilai, dan persoalan bersama.

Tinjauan sistematis yang dilakukan Yemini et al. (2025), menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis tempat menekankan hubungan antara proses belajar dan tempat fisik tempat guru serta peserta didik berada. Pembelajaran dapat melampaui batas ruang kelas dengan memanfaatkan pengalaman peserta didik,

pengetahuan komunitas, dan kondisi lingkungan sekitar. Pendekatan ini mengutamakan pembelajaran kontekstual, pengalaman langsung, keterlibatan komunitas, dan hubungan antara persoalan lokal dengan sistem sosial yang lebih luas.

Kedekatan dengan tempat membuat persoalan yang dipelajari mempunyai makna personal dan sosial bagi peserta didik. Ketika peserta didik meneliti trotoar yang mereka gunakan, saluran air di sekitar sekolah, ruang terbuka hijau di lingkungannya, lokasi genangan, atau tempat penumpukan sampah, mereka tidak sekadar mempelajari objek fisik. Mereka juga mempelajari siapa yang menggunakan ruang tersebut, siapa yang mendapatkan manfaat, siapa yang menghadapi risiko, serta siapa yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan perubahan.

Melalui pembelajaran berbasis tempat, peserta didik juga dapat memahami bahwa persoalan lokal berkaitan dengan isu yang lebih luas. Banjir lokal, misalnya, dapat dikaitkan dengan perubahan penggunaan lahan, tata kelola wilayah, perubahan iklim, perilaku masyarakat, dan kapasitas infrastruktur. Dengan demikian, proses belajar bergerak dari pengamatan konkret menuju pemahaman sistemik dan kritis.

Kesadaran Kewargaan dalam Pembelajaran Partisipatif

Kesadaran kewargaan mencakup pemahaman mengenai hak dan kewajiban, kepekaan terhadap kepentingan umum, kemauan berpartisipasi, kemampuan menyampaikan pendapat, serta kesediaan menghargai perspektif yang berbeda (Lutviana, 2025). Kesadaran tersebut tidak cukup dibangun melalui penjelasan mengenai lembaga pemerintahan, demokrasi, atau aturan kewarganegaraan. Peserta didik perlu mengalami proses demokratis secara langsung dalam lingkungan pembelajaran. Musyawarah, penyusunan kriteria prioritas, pembagian peran, penilaian alternatif, dan presentasi rekomendasi merupakan pengalaman yang dapat mempertemukan pengetahuan kewargaan dengan praktik kewargaan. Ketika peserta didik menentukan persoalan yang harus diprioritaskan, mereka belajar mengemukakan alasan dan menggunakan bukti. Ketika terdapat perbedaan pilihan, mereka belajar mendengarkan, bernegosiasi, dan mencari titik temu.

Pembelajaran berbasis perencanaan partisipatif juga memberi kesempatan kepada peserta didik untuk memahami bahwa keputusan publik selalu melibatkan kepentingan yang beragam (Timpal, 2024). Rencana penataan ruang terbuka, misalnya, dapat menghasilkan perbedaan pandangan antara pengguna kendaraan, pejalan kaki, pedagang, warga sekitar, anak-anak, penyandang disabilitas, dan pemerintah (Nadatunnisa, 2023). Melalui analisis pemangku kepentingan, peserta didik belajar melihat suatu permasalahan dari lebih dari satu sudut pandang. Kemampuan tersebut penting dalam masyarakat demokratis karena keputusan yang bertanggung jawab tidak hanya didasarkan pada keinginan pribadi. Keputusan perlu mempertimbangkan bukti, keadilan, dampak, hak kelompok lain, dan kepentingan bersama. Oleh karena itu, perencanaan partisipatif dapat memperkuat kemampuan deliberatif dan tanggung jawab sosial peserta didik. Kesadaran kewargaan juga berkaitan dengan efikasi kewargaan, yaitu keyakinan bahwa seseorang mampu memahami persoalan dan memberikan kontribusi terhadap perubahan. Apabila pandangan peserta didik hanya didengar secara simbolis, mereka dapat memandang partisipasi sebagai kegiatan yang tidak bermakna. Sebaliknya, ketika hasil pemetaan dan rekomendasi mereka dibahas oleh sekolah atau dikomunikasikan kepada masyarakat, peserta didik memperoleh pengalaman bahwa pengetahuan dapat digunakan untuk kepentingan publik.

Kepedulian terhadap Lingkungan Perkotaan

Kepedulian terhadap lingkungan perkotaan tidak hanya merujuk pada perilaku menjaga kebersihan atau membuang sampah pada tempatnya (Rossevelt. Et al., 2023). Kepedulian lingkungan juga mencakup pemahaman mengenai hubungan antara kualitas lingkungan, keadilan sosial, kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan kebijakan penggunaan ruang. Oleh karena itu, kepedulian lingkungan perlu dikembangkan melalui pengetahuan, pengalaman, refleksi, dan tindakan.

Hadjichambis & Paraskeva-Hadjichambi (2020) mengembangkan pendekatan *Education for Environmental Citizenship* yang mencakup penyelidikan, perencanaan tindakan, keterlibatan kritis, partisipasi kewargaan, pembangunan jejaring, pemeliharaan perubahan sosial-lingkungan, serta evaluasi dan refleksi. Kerangka tersebut menegaskan bahwa pendidikan lingkungan perlu bergerak melampaui perubahan perilaku individual menuju kemampuan melakukan tindakan kolektif di ruang publik.

Pembelajaran lingkungan yang hanya meminta peserta didik menghafal jenis pencemaran atau melakukan tindakan individual berisiko menyederhanakan persoalan (Adroin et al., 2023). Peserta didik perlu memahami

bahwa kerusakan lingkungan juga dipengaruhi oleh kebijakan, pola produksi dan konsumsi, ketimpangan akses terhadap sumber daya, kualitas pelayanan publik, dan hubungan kekuasaan. Melalui perencanaan partisipatif, peserta didik dapat menghubungkan tindakan individual dengan perubahan sosial dan kelembagaan.

Kajian sistematis terhadap 34 penelitian *environmental citizen science* pada pendidikan K-12 menunjukkan pentingnya tindakan kolektif, partisipasi kewargaan, komunikasi temuan, perencanaan tindakan, dan keterlibatan aktif peserta didik dalam pembentukan kewargaan lingkungan. Pengumpulan data saja belum cukup. Peserta didik perlu memahami arti data, mengomunikasikan hasilnya, dan menggunakannya untuk menyusun rekomendasi atau tindakan publik.

Pendekatan tersebut juga sejalan dengan *Education for Sustainable Development*. UNESCO menekankan bahwa pendidikan perlu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang memungkinkan peserta didik berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Pendidikan bukan hanya menyampaikan informasi mengenai keberlanjutan, tetapi juga memberdayakan peserta didik agar mampu memahami keterkaitan antarpersoalan, bekerja sama, mempertimbangkan dampak keputusan, dan melakukan tindakan yang bertanggung jawab.

Gambar 1. Sintesis Konseptual dari Literature review



Sintesis Konseptual

Berdasarkan berbagai kajian tersebut, Pendidikan IPS berbasis perencanaan partisipatif dapat dipahami sebagai pendekatan yang menggabungkan pembelajaran kontekstual, penyelidikan sosial, partisipasi demokratis, dan tindakan lingkungan. Lingkungan perkotaan digunakan sebagai sumber belajar, sedangkan tahapan perencanaan digunakan sebagai struktur kegiatan pembelajaran. Melalui proses identifikasi masalah, pengumpulan data, pemetaan, analisis pemangku kepentingan, penentuan prioritas, penyusunan alternatif, dan perumusan tindakan, peserta didik mengembangkan pengetahuan sekaligus kompetensi kewargaan.

Hubungan antarkonsep dalam artikel ini bersifat saling menguatkan. Perencanaan partisipatif menyediakan pengalaman demokratis yang dapat mengembangkan kesadaran kewargaan. Penggunaan permasalahan perkotaan sebagai objek perencanaan menumbuhkan kepedulian lingkungan berdasarkan pengalaman nyata. Kesadaran kewargaan selanjutnya mendorong peserta didik memandang kepedulian lingkungan sebagai tanggung jawab publik, bukan sekadar pilihan pribadi.

Pendidikan IPS berbasis perencanaan partisipatif menawarkan landasan pedagogis untuk membentuk peserta didik sebagai warga muda yang kritis, peduli, mampu bekerja sama, dan bersedia terlibat dalam upaya mewujudkan lingkungan perkotaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pendekatan ini juga memperkuat keterkaitan antara Pendidikan IPS dan ilmu perencanaan wilayah dan kota karena keduanya menempatkan masyarakat, ruang, lingkungan, kebijakan, dan partisipasi sebagai unsur penting dalam menciptakan kehidupan bersama yang lebih baik.

METODOLOGI PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan pustaka naratif terstruktur. Metode tersebut digunakan untuk mengembangkan pemahaman konseptual mengenai keterkaitan antara Pendidikan IPS, perencanaan partisipatif, kesadaran kewargaan, dan kepedulian terhadap lingkungan perkotaan. Kajian tidak dimaksudkan sebagai tinjauan sistematis yang menghitung keseluruhan publikasi pada basis data tertentu, tetapi sebagai sintesis konseptual terhadap sumber-sumber yang relevan dengan fokus artikel.

Literatur yang dikaji meliputi artikel jurnal ilmiah, buku akademik, bab buku, dan dokumen lembaga internasional. Pemilihan literatur didasarkan pada lima kriteria. Pertama, sumber membahas Pendidikan IPS atau pendidikan kewargaan. Kedua, sumber menjelaskan pendidikan lingkungan atau pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Ketiga, sumber membahas pembelajaran partisipatif, kolaboratif, berbasis proyek, atau berbasis tindakan. Keempat, sumber mengkaji keterlibatan peserta didik dalam pengambilan keputusan. Kelima, sumber mempunyai keterkaitan dengan masalah sosial dan lingkungan di kawasan perkotaan.

Literatur mutakhir diprioritaskan untuk menggambarkan perkembangan kajian, sedangkan beberapa sumber terdahulu digunakan karena memberikan dasar konseptual yang masih relevan. Proses analisis dilakukan melalui pembacaan kritis, identifikasi gagasan utama, pengelompokan konsep, perbandingan antarsumber, dan sintesis tematik. Tema-tema yang dihasilkan kemudian digunakan untuk merumuskan karakteristik dan tahapan Pendidikan IPS berbasis perencanaan partisipatif.

Analisis diarahkan pada empat pertanyaan utama. Pertama, bagaimana persoalan lingkungan perkotaan dapat ditempatkan sebagai sumber belajar IPS? Kedua, bagaimana prinsip perencanaan partisipatif dapat diadaptasi menjadi pendekatan pembelajaran? Ketiga, bagaimana pendekatan tersebut berkontribusi terhadap kesadaran kewargaan peserta didik? Keempat, bagaimana keterlibatan dalam perencanaan dapat mengembangkan kepedulian terhadap lingkungan perkotaan?.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lingkungan perkotaan sebagai sumber belajar Pendidikan IPS

Hasil kajian menunjukkan bahwa lingkungan perkotaan menyediakan sumber belajar yang kaya bagi Pendidikan IPS. Kota merupakan ruang tempat berlangsungnya interaksi antara penduduk, pemerintah, pelaku ekonomi, komunitas, dan lingkungan fisik. Di dalamnya terdapat proses produksi dan konsumsi, mobilitas penduduk, perubahan penggunaan lahan, pembentukan identitas sosial, kompetisi memperoleh ruang, pelayanan publik, dan pengambilan keputusan politik. Karena itu, kota dapat dipahami sebagai laboratorium sosial yang memungkinkan peserta didik melihat secara langsung keterkaitan antara konsep IPS dan kehidupan sehari-hari.

Penggunaan lingkungan perkotaan sebagai sumber belajar mengubah orientasi pembelajaran dari sekadar mempelajari kota menjadi belajar melalui kota (Hajar et al., 2025). Dalam pendekatan pertama, peserta didik hanya menerima informasi mengenai karakteristik perkotaan. Dalam pendekatan kedua, peserta didik menggunakan lingkungan kota untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan analisis, kepekaan sosial, dan kemampuan bertindak. Peserta didik dapat mengamati penggunaan lahan, kondisi drainase, persebaran tempat sampah, fasilitas pejalan kaki, aksesibilitas sekolah, ruang terbuka hijau, atau pola kegiatan ekonomi di sekitar sekolah.

Pendekatan tersebut sejalan dengan pedagogi lingkungan perkotaan kritis yang menempatkan persoalan sosial-lingkungan lokal sebagai objek penyelidikan peserta didik (Pujiati & Anggreini, 2025). Pedagogi ini menekankan penggunaan metode partisipatif untuk mengkaji tempat, pengalaman, dan kondisi sosial-lingkungan yang dekat dengan kehidupan generasi muda. Tujuannya bukan hanya meningkatkan pengetahuan mengenai lingkungan, tetapi juga membantu peserta didik memahami faktor sosial, ekonomi, politik, dan keruangan yang menghasilkan suatu persoalan. Sebagai contoh, persoalan sampah di sekitar sekolah dapat dikaji bukan hanya dari jumlah atau jenis sampah, tetapi juga dari pola konsumsi, ketersediaan sarana, perilaku pengguna ruang, kebijakan sekolah, peran pedagang, dan pelayanan pemerintah. Persoalan banjir dapat dianalisis melalui kondisi drainase, perubahan tutupan lahan, kebiasaan masyarakat, topografi, dan pengelolaan kawasan. Dengan demikian, peserta didik belajar melihat persoalan secara sistemik dan tidak menyederhanakan penyebabnya pada perilaku individu semata.

Pembelajaran yang menggunakan persoalan lokal juga memberikan rasa kedekatan dan relevansi. Peserta didik lebih mudah membangun kepedulian ketika masalah yang dibahas dapat diamati dan dialami secara langsung. Pengetahuan tidak berhenti pada pemahaman abstrak, tetapi terhubung dengan tempat yang mempunyai makna bagi peserta didik. Kedekatan tersebut menjadi landasan bagi tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Perencanaan partisipatif sebagai pendekatan pembelajaran IPS

Perencanaan partisipatif dalam pembelajaran IPS dapat dimaknai sebagai proses yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat dalam mengenali masalah, menyampaikan pandangan, mengumpulkan informasi, mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak, menentukan prioritas, serta menyusun rencana tindakan (Rizqina & Budhi, 2025). Dalam proses tersebut, guru tidak menjadi satu-satunya sumber pengetahuan dan pengambil keputusan. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik mengembangkan pertanyaan, memperoleh data, menguji argumentasi, dan membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang rasional.

Keterlibatan peserta didik dalam proses perencanaan merupakan bentuk penguatan suara siswa (Ulfah et al., 2023). Suara siswa tidak cukup diwujudkan dengan meminta pendapat pada akhir pembelajaran, tetapi perlu ditempatkan dalam proses perumusan masalah dan pengambilan keputusan. Penelitian mengenai pelibatan peserta didik dalam pengembangan pendidikan kewargaan menunjukkan bahwa kolaborasi dan pengambilan keputusan bersama dapat meningkatkan keterlibatan, komitmen, rasa memiliki, kepercayaan diri, dan pemberdayaan peserta didik.

Berdasarkan sintesis literatur, Pendidikan IPS berbasis perencanaan partisipatif dapat diterapkan melalui sembilan tahapan yang saling berhubungan. Tahap pertama adalah orientasi terhadap persoalan lingkungan perkotaan. Guru menyajikan foto, berita, peta, video, atau kasus yang menggambarkan masalah di sekitar sekolah. Pada tahap ini, peserta didik didorong mengemukakan pengalaman dan pandangannya mengenai persoalan tersebut.

Tahap kedua adalah identifikasi dan perumusan masalah. Peserta didik menyusun pertanyaan mengenai kondisi, penyebab, dampak, lokasi, kelompok yang terdampak, dan pihak yang mempunyai kewenangan. Rumusan masalah perlu disusun secara terbuka agar peserta didik tidak langsung diarahkan pada satu kesimpulan.

Tahap ketiga adalah pengumpulan data lapangan. Peserta didik dapat melakukan observasi, wawancara sederhana, dokumentasi, pengukuran, atau penelusuran dokumen. Data dapat berupa lokasi genangan, kondisi fasilitas pejalan kaki, persebaran ruang hijau, kebiasaan membuang sampah, atau pendapat masyarakat terhadap suatu fasilitas publik. Pengumpulan data membantu peserta didik membedakan antara asumsi dan bukti.

Tahap keempat adalah pemetaan masalah. Data yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk peta sederhana, sketsa, tabel, foto beranotasi, diagram, atau peta digital. Pemetaan membantu peserta didik memahami pola persebaran, hubungan antarlokasi, dan kelompok yang terkena dampak. Dalam konteks PWK, tahapan ini juga memperkenalkan cara berpikir spasial dan pentingnya data keruangan dalam pengambilan keputusan.

Tahap kelima adalah analisis pemangku kepentingan. Peserta didik mengidentifikasi pihak yang berkaitan dengan persoalan, seperti warga, sekolah, pedagang, pengguna jalan, pemerintah kelurahan, dinas terkait,

komunitas lingkungan, dan pengelola fasilitas. Mereka kemudian menganalisis kepentingan, kewenangan, tanggung jawab, dan kemungkinan kontribusi masing-masing pihak.

Tahap keenam adalah penentuan prioritas. Peserta didik menetapkan masalah yang perlu ditangani terlebih dahulu dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, jumlah pihak terdampak, besarnya dampak, ketersediaan sumber daya, dan peluang pelaksanaannya. Penentuan prioritas dilakukan melalui diskusi dan musyawarah sehingga peserta didik belajar menyampaikan alasan serta menghargai perbedaan pendapat.

Tahap ketujuh adalah penyusunan alternatif solusi. Setiap kelompok mengembangkan lebih dari satu pilihan penyelesaian. Alternatif tersebut dinilai berdasarkan manfaat sosial, dampak lingkungan, kebutuhan biaya, kemungkinan penerapan, penerimaan masyarakat, dan keberlanjutannya. Peserta didik belajar bahwa satu masalah dapat mempunyai beberapa solusi dan setiap solusi membawa konsekuensi yang berbeda.

Tahap kedelapan adalah perumusan rencana tindakan. Peserta didik menyusun tujuan, kegiatan, pembagian tugas, jadwal, pihak yang perlu dilibatkan, sumber daya, indikator keberhasilan, dan cara mengevaluasi kegiatan. Produk yang dihasilkan dapat berupa proposal penghijauan, rancangan jalur aman menuju sekolah, peta titik sampah, kampanye transportasi berkelanjutan, atau rekomendasi perbaikan ruang publik.

Tahap kesembilan adalah presentasi, tindakan, evaluasi, dan refleksi. Rencana yang telah disusun dipresentasikan dalam forum kelas, musyawarah sekolah, pameran proyek, atau dialog dengan masyarakat. Beberapa tindakan sederhana dapat dilaksanakan secara langsung. Peserta didik kemudian mengevaluasi proses, hasil, hambatan, dan pembelajaran yang diperoleh.

Rangkaian tersebut memiliki kesesuaian dengan pendekatan pendidikan untuk kewargaan lingkungan yang mencakup penyelidikan, perencanaan tindakan, partisipasi kewargaan, pembangunan jaringan, pemeliharaan perubahan sosial-lingkungan, serta evaluasi dan refleksi. Pendekatan tersebut menekankan bahwa pembelajaran lingkungan perlu bergerak dari perubahan sikap individual menuju kemampuan berpartisipasi dalam tindakan kolektif.

Pengembangan kesadaran kewargaan

Kesadaran kewargaan tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai hak, kewajiban, pemerintahan, dan aturan (Belladonna & Anggraena, 2019). Kesadaran kewargaan juga mencakup kemampuan mengenali persoalan bersama, memahami kepentingan publik, menyampaikan pandangan, mendengarkan orang lain, menilai informasi, mengambil keputusan, dan berpartisipasi dalam tindakan sosial. Dalam konteks perkotaan, warga yang sadar tidak hanya menuntut pelayanan, tetapi juga memahami tanggung jawabnya dalam menjaga ruang bersama.

Perencanaan partisipatif mengembangkan kesadaran tersebut melalui pengalaman langsung. Ketika peserta didik melakukan observasi, mereka belajar mengenali persoalan publik. Ketika menganalisis pemangku kepentingan, mereka memahami bahwa setiap pihak mempunyai kepentingan, hak, kewajiban, dan tingkat kewenangan yang berbeda. Ketika bermusyawarah, mereka belajar menyampaikan argumentasi serta menerima bahwa keputusan bersama tidak selalu sama dengan keinginan pribadi. Proses penentuan prioritas juga melatih peserta didik untuk mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas. Mereka perlu memilih apakah suatu rencana memberikan manfaat hanya bagi kelompok tertentu atau bagi sebagian besar masyarakat. Pertimbangan tersebut mendorong berkembangnya orientasi terhadap kepentingan publik. Peserta didik belajar bahwa menjadi warga berarti mampu melihat persoalan dari sudut pandang orang lain dan memikirkan dampak keputusan terhadap kelompok yang berbeda. Forum presentasi dan musyawarah memberikan pengalaman demokratis dalam skala kecil. Peserta didik berlatih mengemukakan pendapat, memberikan tanggapan, membangun konsensus, dan mempertanggungjawabkan keputusan. Pembelajaran IPS kemudian tidak hanya membicarakan demokrasi sebagai sistem pemerintahan, tetapi menghadirkan praktik demokrasi dalam proses belajar.

Model majelis iklim sekolah menunjukkan bahwa proses ko-kreasi, deliberasi, dan pengambilan keputusan dapat memberi ruang bagi peserta didik untuk mengidentifikasi persoalan keberlanjutan dan menyepakati tindakan bersama (Cebrián, Get al., 2025). Pendekatan tersebut menempatkan sekolah sebagai ruang demokratis tempat peserta didik mempraktikkan partisipasi dan mengembangkan kapasitas sebagai agen perubahan di komunitasnya. Kesadaran kewargaan juga tumbuh ketika peserta didik melihat bahwa pandangan dan tindakannya mempunyai arti. Pelaksanaan rencana sederhana, seperti pemetaan sampah atau penyampaian

rekomendasi kepada sekolah, dapat menumbuhkan efikasi kewargaan. Peserta didik merasa bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk berkontribusi dalam memperbaiki kondisi lingkungan. Perasaan mampu memberikan pengaruh merupakan modal penting bagi partisipasi kewargaan pada masa mendatang.

Pengembangan kepedulian terhadap lingkungan perkotaan

Kepedulian lingkungan sering kali dipahami sebatas sikap menyukai kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, atau mengikuti kegiatan penghijauan (Gould et al., 2016). Meskipun tindakan tersebut penting, kepedulian terhadap lingkungan perkotaan perlu mencakup pemahaman yang lebih luas mengenai hubungan antara kondisi lingkungan, kebijakan, perilaku, keadilan, dan kualitas hidup masyarakat.

Perencanaan partisipatif membantu peserta didik memahami bahwa lingkungan perkotaan merupakan ruang hidup bersama (Derr et al., 2018). Kualitas trotoar berkaitan dengan keselamatan pejalan kaki, termasuk anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Ruang terbuka hijau berkaitan dengan kesehatan, interaksi sosial, resapan air, dan kenyamanan termal. Pengelolaan sampah berkaitan dengan pola konsumsi, pelayanan publik, pekerjaan informal, dan kesehatan masyarakat. Melalui pemahaman tersebut, kepedulian lingkungan berkembang sebagai kepedulian sosial sekaligus ekologis.

Kegiatan observasi dan pemetaan memperkuat hubungan emosional peserta didik dengan tempat. Mereka tidak hanya membaca tentang pencemaran, tetapi melihat kondisi saluran air, mencatat timbulan sampah, mengamati pohon yang berkurang, atau mendengarkan pengalaman warga. Pengalaman tersebut dapat menumbuhkan perhatian karena masalah tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan peserta didik. Namun, kepedulian tidak cukup dibangun melalui pengamatan. Peserta didik perlu memperoleh kesempatan untuk merancang dan melakukan tindakan. Penelitian pendidikan lingkungan menunjukkan bahwa program yang menghubungkan pembelajaran dengan komunitas lokal, pengalaman langsung, interaksi sosial, dan tindakan nyata lebih berpotensi mendukung keterlibatan kewargaan dibandingkan pembelajaran yang berhenti pada penyampaian pengetahuan.

Tindakan yang dikembangkan tidak harus berupa proyek besar. Peserta didik dapat menyusun peta titik sampah, mengembangkan kampanye pengurangan plastik, membuat rancangan ruang hijau, melakukan audit aksesibilitas jalan menuju sekolah, atau menyampaikan hasil kajian kepada pengelola sekolah. Hal yang terpenting adalah peserta didik mengalami proses mengubah pengetahuan menjadi tindakan yang direncanakan, dilakukan, dan dievaluasi.

Integrasi kesadaran kewargaan dan kepedulian lingkungan

Hasil sintesis menunjukkan bahwa kesadaran kewargaan dan kepedulian lingkungan tidak seharusnya dikembangkan secara terpisah. Persoalan perkotaan membutuhkan warga yang peduli terhadap lingkungan sekaligus memahami cara berpartisipasi dalam proses sosial dan politik. Sebaliknya, partisipasi kewargaan perlu diarahkan pada penciptaan kehidupan masyarakat yang adil, sehat, aman, dan berkelanjutan.

Pendidikan IPS berbasis perencanaan partisipatif mengintegrasikan kedua dimensi tersebut. Ulfah et al. (2021) berpendapat bahwa kesadaran kewargaan berkembang melalui dialog, musyawarah, analisis kepentingan, pengambilan keputusan, dan tindakan kolektif. Kepedulian lingkungan berkembang melalui pengamatan, pemetaan, analisis dampak, perumusan solusi, dan keterlibatan dalam perbaikan lingkungan. Keduanya bertemu dalam konsep kewargaan lingkungan, yaitu kemampuan menggunakan pengetahuan, nilai, keterampilan, dan partisipasi untuk mendorong perubahan sosial-lingkungan (Rafii, 2024). Integrasi tersebut juga menghindarkan pendidikan lingkungan dari kecenderungan menyalahkan individu. Peserta didik tidak hanya diminta mengubah perilaku pribadi, tetapi juga diajak memahami penyebab struktural, kebijakan, distribusi sumber daya, dan konflik kepentingan. Mereka belajar bahwa tindakan individu perlu didukung tindakan kolektif, kelembagaan, dan kebijakan publik.

Dari perspektif Pendidikan IPS, pendekatan ini memperkuat hubungan antara pengetahuan dan tindakan sosial. Materi mengenai interaksi keruangan, lembaga sosial, kegiatan ekonomi, konflik, kebijakan, dan pembangunan berkelanjutan dapat dipadukan dalam satu proyek. Pembelajaran menjadi lebih integratif karena peserta didik menggunakan berbagai konsep IPS untuk menganalisis satu persoalan nyata.

Peran guru, sekolah, dan mitra masyarakat

Keberhasilan pembelajaran berbasis perencanaan partisipatif sangat dipengaruhi oleh peran guru (Cazorla-Montero et al., 2019). Guru perlu membangun suasana belajar yang aman agar peserta didik berani menyampaikan pendapat. Guru juga perlu memastikan bahwa setiap anggota kelompok memperoleh kesempatan untuk terlibat dan tidak membiarkan keputusan dikuasai oleh beberapa peserta didik. Guru perlu membantu peserta didik membedakan antara pendapat, asumsi, dan bukti. Dalam perencanaan, keputusan tidak cukup didasarkan pada pilihan yang paling populer, tetapi perlu didukung data dan pertimbangan dampak (Gregory et al., 2012). Karena itu, guru berperan mengarahkan peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang dapat dipercaya, membandingkan alternatif, dan menjelaskan alasan di balik setiap rekomendasi.

Sekolah perlu memberikan dukungan berupa waktu, akses terhadap lingkungan, fasilitas dokumentasi, dan ruang untuk mempresentasikan hasil (Barret et al., 2019). Dukungan pimpinan sekolah penting agar proyek tidak berhenti sebagai tugas kelas, tetapi dapat terhubung dengan pengelolaan sekolah. Rekomendasi peserta didik, misalnya, dapat dipertimbangkan dalam program kebersihan, penghijauan, transportasi, atau penataan fasilitas sekolah. Kemitraan dengan pemerintah kelurahan, komunitas, perguruan tinggi, dan organisasi lingkungan dapat memperluas pengalaman peserta didik. Mitra dapat memberikan data, pengetahuan teknis, umpan balik, dan kesempatan bagi peserta didik untuk memahami proses perencanaan dalam kehidupan nyata. Pelibatan mitra harus tetap disesuaikan dengan usia peserta didik serta memperhatikan keamanan dan etika.

Tantangan penerapan

Penerapan perencanaan partisipatif dalam Pendidikan IPS tidak terlepas dari tantangan. Proses observasi dan pengumpulan data membutuhkan waktu lebih panjang dibandingkan pembelajaran konvensional. Guru perlu menyesuaikan proyek dengan capaian pembelajaran dan kalender sekolah. Pengumpulan data lapangan juga memerlukan pengawasan, perizinan, dan pertimbangan keselamatan. Tantangan berikutnya adalah kualitas partisipasi. Partisipasi dapat menjadi simbolis apabila seluruh keputusan penting telah ditentukan oleh guru. Peserta didik mungkin hanya diminta melaksanakan tugas tanpa benar-benar mempunyai ruang untuk memilih masalah, metode, atau alternatif tindakan. Oleh karena itu, guru perlu menentukan bagian-bagian yang dapat diputuskan bersama dan menjelaskan batasan yang tidak dapat diubah. Perbedaan kemampuan komunikasi, kepercayaan diri, dan pengetahuan juga dapat menghasilkan ketimpangan partisipasi. Peserta didik yang lebih aktif berpotensi mendominasi diskusi. Guru perlu menggunakan pembagian peran, diskusi kelompok kecil, catatan individu, dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan seluruh suara diperhatikan.

Selain itu, tidak semua rekomendasi peserta didik dapat dilaksanakan. Keterbatasan kewenangan, anggaran, waktu, dan dukungan institusi dapat menghambat implementasi. Kondisi tersebut perlu dijadikan bagian dari pembelajaran. Peserta didik dapat diajak mengevaluasi kelayakan rencana, mengidentifikasi hambatan struktural, dan memperbaiki alternatif tindakan. Dengan demikian, ketidakberhasilan melaksanakan seluruh rencana tidak dipandang sebagai kegagalan pembelajaran, tetapi sebagai pengalaman memahami kompleksitas proses perencanaan.

KESIMPULAN

Pendidikan IPS berbasis perencanaan partisipatif merupakan pendekatan yang menghubungkan pembelajaran sosial dengan permasalahan nyata di lingkungan perkotaan. Pendekatan ini menempatkan peserta didik sebagai warga muda yang mampu mengamati, mengumpulkan data, memetakan persoalan, menganalisis kepentingan, menentukan prioritas, menyusun alternatif solusi, bermusyawarah, dan merencanakan tindakan. Penerapan perencanaan partisipatif dapat dilakukan melalui tahapan orientasi masalah, perumusan masalah, pengumpulan data, pemetaan, analisis pemangku kepentingan, penentuan prioritas, penyusunan alternatif, perumusan rencana tindakan, serta evaluasi dan refleksi. Tahapan tersebut menjadikan lingkungan perkotaan sebagai laboratorium sosial yang menghubungkan konsep-konsep IPS dengan kehidupan peserta didik.

Pendekatan ini berpotensi mengembangkan kesadaran kewargaan melalui pengalaman berdialog, bekerja sama, menghargai perbedaan, mempertimbangkan kepentingan publik, dan mengambil keputusan secara demokratis. Pada saat yang sama, keterlibatan langsung dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan persoalan kota dapat menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan yang tidak hanya bersifat individual, tetapi juga sosial, kolektif, dan berorientasi pada perubahan. Pendidikan IPS berbasis perencanaan partisipatif dengan demikian dapat menjadi alternatif pembelajaran yang kontekstual, kolaboratif, demokratis, dan transformatif.

Implementasinya memerlukan kesiapan guru, dukungan sekolah, akses terhadap lingkungan sebagai sumber belajar, dan kemitraan dengan masyarakat. Penelitian empiris selanjutnya diperlukan untuk menguji pengaruh model ini terhadap kesadaran kewargaan, kepedulian lingkungan, kemampuan berpikir kritis, literasi spasial, dan kompetensi pemecahan masalah peserta didik pada berbagai karakteristik wilayah perkotaan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ardaniati, V. (2025). Pemanfaatan Lingkungan Sekitar Sebagai Sumber Belajar Ips: Studi Kasus Di Sdn 156 Palembang. *CENDEKIA: Jurnal Pendidikan Terintegrasi*, 1(3), 1-14.
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Ardoin, N. M., Bowers, A. W., & Gaillard, E. (2023). A systematic mixed studies review of civic engagement outcomes in environmental education. *Environmental Education Research*, 29(1), 1–26.
- Barrett, P., Treves, A., Shmis, T., & Ambasz, D. (2019). *The impact of school infrastructure on learning: A synthesis of the evidence*.
- Belladonna, A. P., & Anggraena, S. N. (2019). Penguatan pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge) dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 196-210
- Bellino, M. E., & Adams, J. D. (2017). A critical urban environmental pedagogy: Relevant urban environmental education for and by youth. *The Journal of Environmental Education*, 48(4), 270–284.
- Cazorla-Montero, A., de los Rios-Carmenado, I., & Pasten, J. I. (2019). Sustainable development planning: Master's based on a project-based learning approach. *Sustainability*, 11(22), 6384.
- Cebrián, G., Boqué, A., Olano, J. X., & Prieto, J. (2025). School climate assemblies: An educational tool for empowering pupils and youth to take climate and sustainability action. *Sustainability Science*, 20, 135–153.
- Chan, Y. W. (2025). Social studies advocacy for environmental and sustainability education: A scholarly review and discussion within the US schooling contexts. *Environmental Education Research*, 31(4), 840–854.
- Derr, V., Chawla, L., & Mintzer, M. (2018). *Placemaking with children and youth: Participatory practices for planning sustainable communities*. New Village Press.
- Gregory, R., Failing, L., Harstone, M., Long, G., McDaniels, T., & Ohlson, D. (2012). *Structured decision making: a practical guide to environmental management choices*. John Wiley & Sons.
- Geurts, E. M. A., Reijs, R. P., Leenders, H. H. M., Jansen, M. W. J., et al. (2025). Promoting student voice by involving vocational education students and staff in citizenship education development: A participatory action research study. *Journal of Educational Change*, 26, 271–289.
- Gould, R. K., Ardoin, N. M., Biggar, M., Cravens, A. E., & Wojcik, D. (2016). Environmental behavior's dirty secret: The prevalence of waste management in discussions of environmental concern and action. *Environmental management*, 58(2), 268-282.
- Hadjichambis, A. C., & Paraskeva-Hadjichambi, D. (2020). Education for environmental citizenship: The pedagogical approach. Dalam A. C. Hadjichambis et al. (Ed.), *Conceptualizing Environmental Citizenship for 21st Century Education* (hlm. 237–261). Springer.
- Hadjichambi, D., Hadjichambis, A. C., Adamou, A., & Georgiou, Y. (2023). A systematic literature review of K-12 environmental citizen science initiatives: Unveiling the citizen science pedagogical and participatory aspects contributing to students' environmental citizenship. *Educational Research Review*, 39, 100525. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2023.100525>
- Hajar, I., Pranata, S., Siregar, A. W., Siregar, T. O., Ginting, A., Risdianto, V. F., ... & Lubis, D. P. C. (2025). Analisis Perbedaan Gaya Belajar Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan Wilayah Pedesaan Dan Perkotaan Di Pkbm Al-Ikhram. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(04), 497-506.
- Harahap, F. R. (2013). *Dampak urbanisasi bagi perkembangan kota di Indonesia*. Gramedia
- Juwono, P. T., & Subagiyo, A. (2017). Ruang Air dan Tata Ruang: Pendekatan teknis keairan dan pembangunan berkelanjutan dalam penanganan banjir *perkotaan*. Universitas Brawijaya Press.
- Levy, B. L. M., Busey, C. L., Cuenca, A., Evans, R. W., Halvorsen, A. L., Ho, L. C., Kahne, J., Kissling, M. T., Lo, J. C., McAvoy, P., & McGrew, S. (2023). Social studies education research for sustainable democratic societies: Addressing persistent civic challenges. *Theory & Research in Social Education*, 51(1), 1–46.
- Luthviana, A. D. (2025). Tingkat Kesadaran Kewarganegaraan Mahasiswa. (Doctoral dissertation, Universitas Ivet).
- Nahdatunnisa, N. (2023). *Optimalisasi layanan infrastruktur jalur pedestrian pada kawasan ruang terbuka hijau publik perkotaan*. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Prasojo, E. (2004). People and society empowerment: Perspektif membangun partisipasi publik. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 4(2), 10-24.

- Pujiati, A., & Anggreini, D. (2025). *Pedagogi kritis lingkungan dalam pendidikan IPA (Ecopedagogy): Dari kesadaran ekologis ke tindakan transformasi*. Thalibul Ilmi Publishing & Education.
- Rafi, M. A. (2024). *Analisis Program Adiwiyata Pada Mata Pelajaran IPS Untuk Menanamkan Karakter Peduli Lingkungan Di Smp Negeri 2 Wagir Malang*. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Raden Rahmat).
- Rizqina, Y. M., & Budhi, H. S. (2025). Implementasi Problem Based Learning dalam Pembelajaran IPS untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik di MTs Raudlatusy Syubban Margoyoso Pati. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(1), 634-640.
- Rossevelt, F. A., Aisyah, D., Thamrin, M. H., Mumtahanah, S., Harahap, S. K. N., Marbun, C. M., ... & Tampubolon, M. F. (2023). Pengaruh kesadaran masyarakat terhadap perilaku pembuangan sampah dan upaya pencegahan risiko banjir di kota medan. *SAJJANA: Public Administration Review*, 1(1), 1-10.
- Rubin, B. C. (2012). *Making citizens: Transforming civic learning for diverse social studies classrooms*. Routledge.
- Ruslandi, U., Qomariyah, S., & Sumitra, M. (2025). Peran metode pembelajaran diskusi dalam menciptakan keaktifan belajar siswa di MAS Tarbiyatul Islamiyah. *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Matematika*, 2(1), 79-90.
- Sedwal, M. (2024). School education in creating a sustainable world: Role of humanities and social science discipline as a catalyst in the light of Indian national education policy 2020. In *Roadmap for humanities and social sciences in STEM higher education* (pp. 107-130). Singapore: Springer Nature Singapore.
- Sidiropoulos, E. (2022). The influence of higher education on student learning and agency for sustainability transition. *Sustainability*, 14(5), 3098.
- Siska, Y. (2018). *Pembelajaran IPS di SD/MI*. Garudhawaca.
- Timpal, C. (2024). *Manajemen berbasis sekolah*. Mega Press Nusantara.
- Ulfah, N., Hidayah, Y., & Trihastuti, M. (2021). Urgensi Etika Demokrasi di Era Global: Membangun Etika dalam Mengemukakan Pendapat bagi Masyarakat Akademis Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 329-346.
- Ulfah, N. U., Sumardiyani, L., Ardini, S. N., & Pramesti, M. R. D. (2023). Implementasi proyek penguatan profil pelajar pancasila (p5) dengan tema suara demokrasi di smk negeri 6 semarang. *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 455-462.
- UNESCO. (2017). Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- Un-Habitat. (2018). *State of the World's Cities 2018/9: harmonious cities*. Earthscan.
- Vioreza, N., Hilyati, W., & Lasminingsih, M. (2023). Education for Sustainable Development: Bagaimana Urgensi Dan Peluang Penerapannya Pada Kurikulum Merdeka?. *PUSAKA: Journal of Educational Review*, 1(1), 34-48.
- Wati, S. (2025). Strategi pembelajaran IPS yang efektif untuk siswa sekolah dasar. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Mahasiswa dan Akademisi*, 1(1), 95-105.
- Wulandari, I., Ningsih, S., & Aziz, S. (2025). Pengembangan Model Pembelajaran IPS Yang Berbasis Masalah dan Proyek Di Sekolah Dasar. *Arini: Jurnal Ilmiah Dan Karya Inovasi Guru*, 2(1), 16-32.
- Yemini, M., Engel, L., & Ben Simon, A. (2025). Place-based education—A systematic review of literature. *Educational Review*, 77(2), 640–660. <https://doi.org/10.1080/00131911.2023.2177260>